BPHTB - PROSEDUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 2024

PERWAL NO. 23, BD 2024/ NO. 23 Tahun 2024, 20 HLM

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- ABSTRAK : Bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah melalui bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan serta untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan landasan hukum terhadap prosedur dan tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Depok.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 15 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana tela beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kota Depok No 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Depok No 10 Tahun 2016, Perda Kota Depok No 1 Tahun 2024.
 - Perda ini berisikan tentang ketentuan Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, di antaranya mengenai prosedur dan tata cara pemungutan BPHTB yang mencakup perekaman data SSPD BPHTB, pembayaran BPHTB, penyampaian SSPD BPHTB, penelitian SSPD BPHTB, pengesahan SSPD BPHTB, kurang Bayar SSPD BPHTB, pengurangan pembayaran BPHTB, pembetulan SSPD BPHTB, keberatan Pembayaran SSPD, keberatan Pembayaran BPHTB, surat Keterangan Bebas BPHTB, penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), penerapan Akta Pembagian Hak Bersama, pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB pengesahan dan perekaman SSPD BPHTB untuk kondisi tertentu dalam peralihan hak, Penerapan Akta Pembagian Hak Waris, dan fasilitasi yang mencakup pengoordinasian, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Perwal ini.

Catatan

- : Pada saat peraturan ini berlaku, Perwal Kota Depok No 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Depok No 31 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.